

Evaluasi Pelaksanaan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada Puskesmas Bangkonol Desa Setra Jaya, Kabupaten Pandeglang

Fitri¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesias
66611900066@untirta.ac.id

Riny Handayani²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
Riny.handayani@untirta.ac.id

Sierfi Rahayu³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia
Sierfi.rahayu@untirta.ac.id

ABSTRACT

The First Thousand Days of Life Movement represents an initiative introduced by the Pandeglang District Government to accelerate the reduction of stunting rates. Initiated in 2019, the program remains in operation to date. This study aims to evaluate the implementation of the program in addressing stunting at the Bangkonol Community Health Center's Technical Implementation Unit, located in Setrajaya Village, Pandeglang District. The evaluation is guided by the public policy evaluation framework proposed by Leo Agustino (2022:84), and employs a qualitative descriptive research approach. The findings reveal that the program's execution has yet to reach an optimal standard. From the perspective of human resources, there is an absence of clearly defined qualifications for the selection of posyandu (integrated health post) cadres. Additionally, there is a lack of systematic supervision and dissemination of information concerning the appropriate provision of complementary foods (MP-ASI) to parents of children aged 6 to 24 months. Institutionally, the implementation lacks a formal Standard Operating Procedure (SOP), which hinders the consistency of the program. However, infrastructure and technological support are being utilized effectively in line with the Ministry of Health's guidelines, including the use of social media platforms to disseminate stunting-related information. Financial planning and management are deemed sufficient and well-balanced. Nonetheless, regulatory mechanisms have yet to be fully synchronized, and participation from young parents in utilizing posyandu services remains limited, thereby affecting the overall impact of the program.

Keywords: *Public Policy Evaluation, The First Thousand Days of Life Movement Programme, Stunting.*

LATAR BELAKANG

Menurut data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada bulan Desember 2023 tercatat sebanyak 280,73 juta jiwa. Angka ini meningkat sebanyak 1,61 juta jiwa dibandingkan dengan data pada bulan Juni 2023. Jika ditinjau dari jenis kelamin, sebanyak 141,67 juta jiwa (50,47%) merupakan laki-laki, sedangkan 139,05 juta jiwa (49,53%) merupakan perempuan. Namun, tingginya jumlah penduduk dapat menimbulkan permasalahan jika tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Terdapat tiga penyebab utama rendahnya kualitas SDM, yaitu permasalahan pendidikan, kesehatan, serta pendapatan per kapita. Jumlah penduduk yang besar memicu beragam permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan isu kesehatan. Tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan berkurangnya ketersediaan lapangan kerja, sehingga memicu meningkatnya pengangguran. Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, yang pada akhirnya mengarah pada kemiskinan. Situasi kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, yang berimbas pada menurunnya derajat kesehatan dan meningkatnya risiko penyakit, termasuk stunting pada balita.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, sehingga mengakibatkan tubuh anak menjadi lebih pendek dari standar usianya. Kekurangan gizi tersebut dapat terjadi sejak masa kehamilan. Apabila ibu hamil mengalami kekurangan asupan gizi, anemia, serta hidup dalam lingkungan dengan sanitasi yang buruk, maka bayi dalam kandungan berisiko mengalami stunting. Anak balita yang mengalami stunting akan menghadapi berbagai dampak negatif. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada tinggi badan yang tidak optimal, tetapi juga mencakup berbagai konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang yang memengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak secara keseluruhan.

Upaya penanganan stunting di Kabupaten Pandeglang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan status gizi balita sekaligus memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Salah satu program unggulan dalam percepatan penurunan stunting adalah melalui pelaksanaan Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan yang menyoar ibu hamil dan anak usia 0–2 tahun. Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka membangun partisipasi aktif guna mendukung percepatan penanganan stunting. Gerakan ini menekankan pentingnya keterlibatan dan perhatian para pemangku kepentingan secara terstruktur dan terkoordinasi terhadap pemenuhan gizi janin dan bayi dalam periode seribu hari pertama kehidupannya, berikut hasil observasi awal peneliti :

Pertama peneliti menemukan bahwa pelaksanaan program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan di Desa Setrajaya, yang merupakan wilayah kerja UPT Puskesmas Bangkonol, belum terlaksana secara optimal. Temuan awal dari hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa program pemberian makanan tambahan dan imunisasi bagi ibu hamil belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program 1000 HPK yang menargetkan ibu hamil, kegiatan yang dilakukan mencakup distribusi makanan tambahan, pemberian imunisasi, serta penyediaan tablet penambah darah. Akan tetapi, pelaksanaan imunisasi dan pemberian makanan tambahan tersebut belum mampu memenuhi sasaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019. Temuan ini diperkuat oleh data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti.

Tabel 1. Jumlah Persentase Pemberian Makanan Tambah Untuk Ibu Hamil Di Puskesmas Bangkonol Tahun 2021-2023

PUSKESMAS	DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
BANGKONOL	Pasirjaksa	83,60%	89%	95%
	Bangkonol	79,70%	88,20%	90%
	Tegalongok	84%	87,60%	93%
	Pasirkarag	80%	89,60%	96%
	Paniis	81,70%	88%	93%
	Setrajaya	79%	89,70%	86%
	Karangsetra	87%	91%	90,50%
	Pakuluran	84%	89,70%	95%
	Koroncong	85%	88,90%	92%
	Gerendong	79,30%	87%	92,70%
	Awilega	85,70%	89%	94,50%
	Sukajaya	87,70%	86,50%	93%

Sumber: UPT Puskesmas Bangkonol 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, pelaksanaan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil masih belum mencapai target karena persentasenya masih di bawah angka 100%. Hal ini khususnya terlihat di Desa Setrajaya yang mengalami penurunan jumlah penerima manfaat. Persentase ibu hamil yang menerima makanan tambahan pada tahun 2022 sebesar 89,70%, menurun menjadi 86% pada tahun 2023. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil di Desa Setrajaya masih belum berjalan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Persentase Ibu Hamil Imunisasi Lengkap Di Puskesmas Bangkonol Tahun 2021-2023

PUSKESMAS	DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
BANGKONOL	Pasirjaksa	67%	73,20%	86%
	Bangkonol	71%	79%	89,10%
	Tegalongok	73%	77,90%	85%
	Pasirkarag	79%	84%	89,40%

PUSKESMAS	DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
	Paniis	74%	79%	84,50%
	Setrajaya	75%	87%	85,60%
	Karangsetra	69%	76,70%	87%
	Pakuluran	70%	87%	90%
	Koroncong	77%	83,80%	89%
	Gerendong	73%	80%	83,80%
	Awilega	69%	76,80%	84,90%
	Sukajaya	79%	85%	89,40%

Sumber: UPT Puskesmas Bangkonol 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2, persentase ibu hamil yang telah memperoleh imunisasi dasar lengkap masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 95%. Di Desa Setrajaya, terjadi penurunan persentase ibu hamil yang menerima imunisasi, dari 87% pada tahun 2022 menjadi 85,60% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya selisih sekitar 2% dalam cakupan imunisasi dasar lengkap bagi ibu hamil di wilayah tersebut.

Kedua, pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap dan pemberian makanan tambahan bagi balita masih belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan yang menysasar balita hingga usia dua tahun, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemantauan pemenuhan ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita, serta distribusi makanan tambahan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih terdapat beberapa aspek dalam program tersebut yang belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal cakupan imunisasi dasar lengkap dan pemberian makanan tambahan bagi balita. Pernyataan ini diperkuat oleh data yang telah berhasil dihimpun oleh peneliti.

Tabel 3. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Balita Di Puskesmas Bangkonol Tahun 2021-2023

PUSKESMAS	DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
BANGKONOL	Pasirjaksa	71,20%	79%	87%
	Bangkonol	78,20%	87%	90%
	Tegalongok	79%	85%	94%
	Pasirkarag	56,12%	78%	89%
	Paniis	78%	83,20%	91%
	Setrajaya	79%	69,80%	80%
	Karangsetra	74,90%	85,40%	92%
	Pakuluran	79%	81%	95%

PUSKESMAS	DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
	Koroncong	78,20%	87%	93%
	Gerendong	73%	81%	83,40%
	Awilega	77,80%	89,10%	92,30%
	Sukajaya	81,20%	89%	93,40%

Sumber: UPT Puskesmas Bangkonol 2024

Berdasarkan pada Tabel 3, persentase balita yang menerima imunisasi dasar lengkap masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95%. Beberapa desa masih menunjukkan pencapaian yang cukup rendah, termasuk Desa Setrajaya yang pada tahun 2023 hanya mencapai angka 80%. Meskipun terdapat peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih belum berhasil memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Tabel 4. Persentase Pemberian Makanan Tambah Pada Balita Di Puskesmas Bangkonol Tahun 2021-2023

PUSKESMAS	DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
BANGKONOL	Pasirjaksa	79,90%	87%	93,30%
	Bangkonol	81,20%	87%	81%
	Tegalongok	86%	93,70%	100%
	Pasirkarag	82%	85%	91%
	Paniis	87%	89,50%	94,30%
	Setrajaya	85%	79,60%	80,90%
	Karangsetra	81%	89%	95%
	Pakuluran	81%	87%	92%
	Koroncong	74,83%	87%	91%
	Gerendong	77%	89,70%	92,30%
	Awilega	83%	89,10%	93,70%
	Sukajaya	89%	91%	94,50%

Sumber: UPT Puskesmas Bangkonol 2024

Berdasarkan Tabel 4, persentase balita yang memperoleh makanan tambahan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian pemberian makanan tambahan kepada balita hanya mencapai 90%.

Khususnya di Desa Setrajaya, tingkat pencapaian merupakan yang terendah, yaitu hanya sebesar 80,90% pada tahun 2023.

Ketiga, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan konseling MP-ASI kepada rumah tangga yang memiliki balita. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada hari Kamis, 26 Oktober 2023, dengan Ibu Salnah, salah satu warga Desa Setrajaya yang berada dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Bangkonol, diketahui bahwa ia yang memiliki balita berusia 12 bulan belum pernah menerima konseling mengenai pemberian MP-ASI yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak usia balita.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Maria, warga Kelurahan Cigadung dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Pagadungan, pada hari Rabu, 22 Mei 2024. Dari hasil observasi awal diketahui bahwa Ibu Maria yang memiliki balita berusia 10 bulan telah mengikuti kegiatan penyuluhan mengenai gizi seimbang dan pemberian MP-ASI yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Posyandu Anggrek 1 Kelurahan Cigadung yang termasuk dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Pagadungan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait Evaluasi Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dalam Penanggulangan *Stunting* pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bangkonol di Desa Setrajaya, Kabupaten Pandeglang.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi umumnya dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu kebijakan publik dalam rangka mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan serta mengidentifikasi sejauh mana perbedaan antara ekspektasi dengan realitas. Anderson (dalam Winarno, 2014:229) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan secara umum dapat dipahami sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap kebijakan yang mencakup aspek substansi, pelaksanaan, dan dampak dari kebijakan tersebut. Sementara itu, menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2014:229), evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda. Tugas pertama adalah mengidentifikasi konsekuensi dari suatu kebijakan dengan memaparkan dampaknya, sedangkan tugas kedua adalah menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan tolok ukur atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses faktual yang melibatkan pengukuran dan penilaian, baik pada tahapan implementasi maupun hasil akhir (outcome) atau dampak (impact) dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program tertentu, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ke depan.

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah

berdasarkan pedoman-pedoman yang telah dirancang sebelumnya. Evaluasi kebijakan tidak selalu dilakukan di akhir, namun dapat dimulai sejak kebijakan mulai diimplementasikan. Selain itu, evaluasi kebijakan publik juga berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan yang tengah atau telah dijalankan, guna menentukan apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan, disesuaikan, atau dihentikan agar tetap sejalan dengan tujuan yang diharapkan.

Model Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik menurut Agustino (2022:84) setidaknya harus memiliki lima aspek yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, Keuangan, dan regulasi.

Sumber Daya Aparatur

Agustino (2022:84) Sumber Daya Aparatur merupakan dimensi yang sangat penting pada proses pelaksanaan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan bisa mengalami kegagalan jika Sumber Daya Aparatur itu sendiri tidak memahami terkait kebijakan tersebut. Dalam aspek sumber daya aparatur setidaknya ada dua dimensi yang harus di evaluasi yaitu kompetensi dan kapabilitas. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap standar kerja yang diharapkan organisasi publik. Pada saat organisasi membutuhkan sumber daya aparatur, organisasi tersebut akan menetapkan kompetensi dasar kandidat-kandidat yang akan direkrutnya. Sebab latar belakang pendidikan akan turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu kapabilitas diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Kelembagaan

Agustino (2022:87) Kelembagaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu kebijakan. Kelembagaan sendiri menjadi tempat untuk proses pengambilan Keputusan pada proses pelaksanaan kebijakan. Kelembagaan juga menjadi tempat komunikasi antara pemangku kepentingan agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Dalam dimensi kelembagaan setidaknya ada dua aspek aspek yang menjadi acuan evaluasi yaitu manajemen organisasi, koordinasi dan kolaborasi.

Sarana Prasarana dan Teknologi

Agustino (2022:89) Sarana, prasarana dan teknologi juga menjadi bagian yang penting yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Maka dari itu sarana prasarana dan teknologi juga menjadi kriteria dalam penilaian keberhasilan suatu kebijakan, apakah kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.

Keuangan

Agustino (2022:91) Keuangan menjadi bagian penting yang tidak mungkin terlewatkan karena untuk melaksanakan kebijakan pasti membutuhkan dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan selama melaksanakan kebijakam. Jika dukungan keuangan tidak optimal maka bisa saja kebijakan yang dilaksanakan memperlambat kebijakan tersebut, bahkan bisa terhenti yang disebabkan oleh dana keuangan.

Regulasi

Agustino (2022:92) Regulasi merupakan peraturan yang dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, dimana regulasi juga menjadi petunjuk sebagai arah kebijakan tersebut. Sehingga dapat mewujudkan tujuan yang sudah disepakati bersama. Maka dari itu, menilai suatu keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari regulasi. Regulasi yang jelas dan terarah maka keberhasilan pada suatu kebijakan akan mudah untuk dicapai.

METODE

Lokasi penelitian ini berpusat di Desa Setrajaya, yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama periode Januari hingga Desember 2023. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dalam upaya penanggulangan stunting di lingkungan kerja UPT Puskesmas Bangkonol, khususnya di Desa Setrajaya, Kabupaten Pandeglang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian merupakan uraian dari temuan yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan observasi di lapangan dan diselaraskan dengan teori yang digunakan, yaitu teori evaluasi kebijakan publik menurut Leo Agustino (2022:84), yang mencakup lima aspek utama, yaitu: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, keuangan, serta regulasi. Adapun berikut ini merupakan hasil penelitian terkait Evaluasi Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan dalam Menanggulangi Stunting pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bangkonol di Desa Setrajaya, Kabupaten Pandeglang.

Sumber Daya Aparatur

Menurut Agustino (2022:84), sumber daya aparatur merupakan salah satu dimensi yang sangat krusial dalam proses implementasi kebijakan. Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan dapat terjadi apabila aparatur pelaksana tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap substansi kebijakan tersebut. Dalam konteks sumber daya aparatur, terdapat dua dimensi utama yang perlu dievaluasi, yakni kompetensi dan kapabilitas. Kompetensi dimaknai sebagai kemampuan kerja individu yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi publik. Ketika organisasi memerlukan sumber daya aparatur, maka organisasi akan menetapkan standar kompetensi dasar bagi para calon yang akan direkrut. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun kapabilitas diartikan sebagai kapasitas seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.

Tabel 5. Jenis Pendidikan Sumber Daya Aparatur Di Puskesmas Bangkonol Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah
1	S1 Kedokteran Umum	3
2	S1 Keperawatan	11
3	S1 Kesehatan Masyarakat	3
4	D3 Keperawatan	13
5	D3 Perawat Gigi	1
6	S1 Farmasi	3
7	D4 Kebidanan	10
8	D3 Kebidanan	15
9	D3 Farmasi	1
10	SMA	5
11	SMP	2
12	Administrasi Umum	5
Jumlah		72 Orang

Sumber: UPT Puskesmas Bangkonol 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.5, jumlah sumber daya aparatur yang tersedia di UPT Puskesmas Bangkonol tercatat sebanyak 72 orang, dengan hampir seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa dalam proses rekrutmen kader posyandu tidak diberlakukan kriteria khusus tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kompetensi para kader posyandu belum tentu sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan secara optimal. Tugas kader posyandu antara lain meliputi kegiatan pengukuran dan pencatatan setelah pelaksanaan kegiatan posyandu. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih terdapat sejumlah orang tua balita yang belum memahami secara menyeluruh mengenai pemberian makanan tambahan atau MP-ASI. Selain itu, bidan desa juga belum melaksanakan konseling terkait tata cara pemberian MP-ASI yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita usia 6 hingga 24 bulan. Kendala lainnya adalah beberapa balita mengalami kesulitan makan serta kondisi ekonomi keluarga yang rendah, sehingga orang tua tidak mampu memberikan asupan gizi yang seimbang. Keadaan ini berisiko menyebabkan kekurangan gizi pada balita dan dapat menghambat proses tumbuh kembangnya.

Kelembagaan

Menurut Agustino (2022:87), kelembagaan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian suatu kebijakan. Kelembagaan berfungsi sebagai wadah dalam proses pengambilan keputusan selama pelaksanaan kebijakan

berlangsung. Selain itu, kelembagaan juga menjadi media komunikasi bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif. Dalam aspek kelembagaan, terdapat dua indikator utama yang menjadi dasar evaluasi, yakni manajemen organisasi serta koordinasi dan kolaborasi yang terjalin antar pihak terkait.

Gambar 1. Kegiatan Rembug Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang 2024

Dalam hal koordinasi dan komunikasi, Dinas Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah dinas lain yang memiliki perhatian serupa terhadap pelaksanaan program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan workshop dan forum rembug stunting yang membahas persoalan stunting dengan melibatkan Bidan Desa serta Kader Posyandu. Bidan Desa juga telah menjalin komunikasi aktif dengan kader posyandu terkait pelaksanaan imunisasi bagi balita, pemberian makanan tambahan, serta pendataan jumlah balita yang belum memperoleh imunisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan pada beberapa aspek masih belum optimal. Data yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa UPT Puskesmas Bangkonol belum menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses pelaksanaan program tersebut, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam aspek kelembagaan, yaitu belum tersusunnya SOP oleh UPT Puskesmas Bangkonol mengenai pelaksanaan Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan. Kondisi ini dapat berdampak pada pelaksanaan program yang tidak sejalan dengan tujuan awal. Meskipun demikian, koordinasi dan komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bidan Desa, dan Kader Posyandu telah berjalan dengan baik.

Sarana Prasarana dan Teknologi

Agustino (2022:89) Sarana, prasarana dan teknologi juga menjadi bagian yang penting yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik. Oleh sebab itu sarana prasarana dan teknologi juga menjadi kriteria dalam penilaian keberhasilan suatu kebijakan, apakah kebijakan berhasil dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.

Gambar 2. Pengukuran Tinggi Badan Balita



Sumber: Peneliti 2024

Gambar 2. merupakan kegiatan posyandu di Desa Setrajaya, dokumentasi tersebut hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Saat proses pengukuran tinggi badan balita sudah menggunakan alat-alat yang sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK/.01.07/MENKES/51/2022 Tentang Standart Alat Antropometri Dan Alat Deteksi Dini Perkembangan Anak. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa sarana prasarana kegiatan posyandu di Desa Setrajaya sudah sangat memadai.

Gambar 3. Pengukuran Berat Badan Balita



Sumber: Peneliti 2024

Alat ukur berat badan pada kegiatan posyandu di Desa Setrajaya menggunakan timbangan digital sesuai yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Terlihat dari **Gambar 3.** dari hasil observasi peneliti, ketika kegiatan posyandu di Desa Setrajaya. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, maka disimpulkan bahwa pada saat kegiatan posyandu dan imunisasi dasar, sudah menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai standar Kementerian Kesehatan.

Gambar 4. Postingan Edukasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang 2024

Berdasarkan **Gambar 4.** dalam pemanfaatan teknologi untuk promosi atau edukasi terkait stunting menggunakan media sosial yaitu instagram, dengan akun resmi Dinas Kesehatan Pandeglang.

Keuangan

Agustino (2022:91) Keuangan menjadi bagian penting yang tidak mungkin terlewatkan karena untuk melaksanakan kebijakan pasti membutuhkan dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan selama melaksanakan kebijakan. Jika dukungan keuangan tidak optimal, maka kebijakan yang dilaksanakan dapat memperlambat kebijakan tersebut, bahkan bisa terhenti.

Tabel 6. Anggaran Pelaksanaan Program Gerakan 1000 HPK Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2022-2023

NO	Tahun	Anggaran
1	2022	534.385.000
2	2023	728.273.800

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang 2024

Dari hasil penelitian ini dukungan keuangan terkait pelaksanaan program gerakan seribu hari pertama kehidupan mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang, telah memberikan anggaran untuk kegiatan imunisasi dan pemberian makanan tambah dalam pencegahan stunting. Dapat disimpulkan bahwa untuk dukungan keuangan pada program gerakan seribu hari pertama kehidupan sudah terlaksana dengan baik.

Regulasi

Agustino (2022:92) Regulasi merupakan peraturan yang dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, dimana regulasi juga menjadi petunjuk sebagai arah kebijakan tersebut. Sehingga dapat mewujudkan tujuan yang sudah disepakati bersama. Maka dari itu, menilai suatu keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari regulasi. Regulasi yang jelas dan terarah dapat menghasilkan keberhasilan pada suatu kebijakan akan mudah untuk dicapai.

Tabel 7. Jumlah Balita Imunisasi Dasar Lengkap Puskesmas Bangkonol

Tahun 2021-2023

PUSKESMAS	DESA	TAHUN		
		2021	2022	2023
BANGKONOL	Pasirjaksa	71,20%	79%	87%
	Bangkonol	78,20%	87%	90%
	Tegalongok	79%	85%	94%
	Pasirkarag	56,12%	78%	89%
	Paniis	78%	83,20%	91%
	Setrajaya	79%	69,80%	80%
	Karangsetra	74,90%	85,40%	92%
	Pakuluran	79%	81%	95%
	Koroncong	78,20%	87%	93%
	Gerendong	73%	81%	83,40%
	Awilega	77,80%	89,10%	92,30%
	Sukajaya	81,20%	89%	93,40%

Sumber: UPT Puskesmas Bangkonol, 2024

Dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan program gerakan seribu hari pertama kehidupan di Desa Setrajaya masih belum mendapatkan dukungan penuh dari beberapa orang tua balita terkait imunisasi dasar lengkap. Desa Setrajaya pada tahun 2023 hanya mencapai 80% dengan jumlah target yang paling kecil dari desa yang lainnya. Untuk imunisasi dasar lengkap sudah di targetkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang di angka 95% pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2019 pada BAB V Pasal 8. Dengan hasil balita yang sudah diimunisasi dan target Desa Setrajaya masih kurang 15% untuk mencapai target tersebut. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan terkait regulasi program Gerakan seribu hari pertama kehidupan para aparatur di Desa Setrajaya terutama bidan desa, sudah memahami kebijakan tersebut dengan baik. Namun, jika memang ada aparatur yang belum memahami regulasi tersebut,

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang akan memberikan pelatihan kepada aparatur tersebut untuk meningkatkan kapasitasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis dan temuan-temuan yang sudah peneliti dapatkan pada saat turun ke lapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan Dalam Mengatasi Stunting Pada Unit Pelayanan Teknis Di Desa Setrajaya Kabupaten Pandeglang masih belum berjalan dengan optimal. Karena, terdapat tiga aspek yang belum optimal. Dengan hasil yang didapat sebagai berikut:

Pertama, Sumber Daya Aparatur terkait penentuan kandidat yang menjadi kader posyandu tidak ada prasyarat untuk menjadi kader posyandu, hal ini akan menyebabkan kader posyandu yang membantu bidan di Desa Setrajaya kurang berkompeten dalam melaksanakan Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan. Kader posyandu sendiri berperan penting dalam proses pelaksanaan program karena kader harus menimbang, mengukur balita dan mendatanya. Bidan Desa tidak melakukan konseling MP-ASI kepada orang tua balita dalam pemenuhan gizi balita pada umur 6-24 bulan.

Kedua, Kelembagaan UPT Puskesmas Bangkonol tidak membuat SOP terkait pelaksanaan Program Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sehingga hal tersebut akan membuat proses pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya.

Ketiga, Regulasi ini tidak berjalan dengan harmoni karena masih ada beberapa orang tua balita yang tidak datang untuk di imunisasi pada saat kegiatan posyandu.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti uraikan, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan UPT Puskesmas Bangkonol dan perangkat Desa Setrajaya membuat prasyarat khusus dalam pencalonan kandidat menjadi kader posyandu
2. UPT Puskesmas Bangkonol diharapkan membuat SOP terkait pelaksanaan program 1000 HPK
3. UPT Puskesmas Bangkonol serta bidan desa diharapkan memberikan memberikan edukasi terkait MP-ASI dan imunisasi kepada orang tua yang memiliki balita.

REFERENSI

Buku

Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Press

Agustino, Leo. 2022. *Memahami Evaluasi Kebijakan*. Malang: PT Citra Intrans Selaras

Candra, Ayu. 2020. *Epidemiologi Stunting*. Semarang: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Lexy J. Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Sugiyono. 2019. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta

Jurnal

Ratna Wahyuningtias dan Intan Zainafree. 2022. Evaluasi Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Dalam Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsri II Kabupaten Jepara, *10*(2), 172-177.

Febri Rahayu dkk. 2022. Evaluasi Program Pemberian Zinc Dalam Pencegahan Stunting Pada Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan, *8*(2), 309-319.